

MANAJEMEN KONFLIK DALAM PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Delta Dea Ananta¹, Syamsir², Rahmatul Ilham³, Mila Nor Elijha⁴, Zahir Fikri Rashief Azwar⁵
^{1, 2, 3, 4, 5}Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: Rahmatulilham592@gmail.com

Article History	Abstract. This article discusses conflict management in utilizing the demographic bonus as a strategic opportunity for sustainable development in the Ministry of Environment and Family Development. This study uses a descriptive qualitative approach to understand the dynamics of processes, context, and interaction patterns among stakeholders in managing the potential of the productive age group. Research data were obtained from secondary sources, including ministry policy documents, scientific publications, national statistical reports, and strategic documents related to demographic resilience, family planning, human development, and the environment. Data collection was conducted through literature review, document analysis, and examination of official reports. Data analysis employed content analysis techniques through the process of coding, categorization, and meaning extraction. The study results indicate that conflicts are generally triggered by mismatches between institutional capacity, labor market needs, and the quality of the working-age population, and are further reinforced by disparities in access to education, healthcare, and women's economic participation. These findings underscore that integrative conflict management through cross-sector collaboration, governance strengthening, and data-driven planning is key to optimizing the demographic bonus and supporting sustainable development goals.
Received: 22-11-2025	
Revision: 08-12-2025	
Accepted: 10-12-2025	
Published: 12-12-2025	
	Keywords: Conflict Management, Demographic Bonus, Demographic Resilience, Sustainable Development, Human Capital, Governance
	Abstrak. Artikel ini membahas manajemen konflik dalam pemanfaatan bonus demografi sebagai peluang strategis bagi pembangunan berkelanjutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika proses, konteks, serta pola interaksi antar-pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi usia produktif. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder yang mencakup dokumen kebijakan kementerian, publikasi ilmiah, laporan statistik nasional, dan dokumen strategis terkait ketahanan demografis, perencanaan keluarga, pembangunan manusia, dan lingkungan hidup. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen, dan telaah laporan resmi. Analisis data menggunakan teknik analisis isi melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan penarikan makna. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik umumnya dipicu oleh ketidaksesuaian antara kapasitas institusi, kebutuhan pasar kerja, dan kualitas penduduk usia produktif, serta diperkuat oleh ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi perempuan. Temuan ini menegaskan bahwa manajemen konflik yang integratif melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan tata kelola, dan perencanaan berbasis data menjadi kunci dalam mengoptimalkan bonus demografi dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.
	Kata Kunci: Manajemen Konflik, Bonus Demografi, Ketahanan Demografis, Pembangunan Berkelanjutan, Modal Manusia, Tata Kelola
How to Cite: Ananta, D. D., Syamsir., Ilham, R., Elijha, M. N., & Azwar, Z. F. R. (2025). Manajemen Konflik dalam Pemanfaatan Bonus Demografi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Keluarga. <i>Indo-MathEdu Intellectuals Journal</i> , 6 (8), 11842-11848. http://doi.org/10.54373/imeij.v6i8.4592	

PENDAHULUAN

Bonus demografi merupakan fase penting dalam perjalanan pembangunan nasional ketika jumlah penduduk usia produktif mencapai proporsi tertinggi dalam struktur demografis. Situasi ini membuka peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan sosial. Agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan, diperlukan pengelolaan yang terarah dan komprehensif, terutama pada aspek penguatan kualitas sumber daya manusia serta tata kelola institusi. Tanpa perencanaan matang, potensi ini dapat berubah menjadi tekanan baru bagi negara, khususnya jika tidak diiringi peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga yang terlibat (Soesatyo, 2024).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Keluarga memegang peran strategis dalam memastikan integrasi antara aspek ekologi, kesejahteraan keluarga, dan pembangunan manusia. Sinergi antara dimensi lingkungan dan dinamika kependudukan menjadi fondasi dalam merancang kebijakan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Tantangan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya alam, tetapi juga perubahan pola hidup masyarakat, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, serta kebutuhan akan peningkatan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan industri. Faktor-faktor tersebut memunculkan berbagai potensi pertentangan kepentingan yang perlu ditangani dengan pendekatan yang tepat (Lubis & Romadhona, 2024).

Konflik dalam konteks pemanfaatan bonus demografi dapat bersumber dari ketidakselarasan tujuan antarinstansi, ketidakseimbangan distribusi peluang, ataupun lemahnya koordinasi lintas sektor. Persoalan seperti pengangguran usia muda, ketimpangan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta kualitas kesehatan masyarakat memperkuat kompleksitas permasalahan. Tanpa mekanisme pengelolaan yang responsif, konflik tersebut dapat menghambat proses pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen konflik diperlukan untuk menata hubungan antar-pemangku kepentingan, menyelaraskan kebijakan, dan mengantisipasi risiko yang mungkin muncul selama proses implementasi program (Masruchiyah & Laratmase, 2023). Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber konflik yang berkaitan dengan pemanfaatan bonus demografi, menganalisis pola interaksi antaraktor kebijakan, serta merumuskan strategi manajemen konflik yang efektif dan berbasis bukti.

Pendekatan manajemen konflik yang efektif menuntut identifikasi menyeluruh terhadap sumber ketegangan, analisis terhadap pola interaksi antaraktor, serta perumusan strategi resolusi yang berbasis data dan konteks empiris. Upaya ini perlu dibangun melalui koordinasi yang kuat, komunikasi yang transparan, dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas

sistem demografis. Dengan mengutamakan kolaborasi dan perencanaan berbasis data, pemanfaatan bonus demografi dapat diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Pendahuluan ini memberikan gambaran mengenai urgensi manajemen konflik dalam mengoptimalkan potensi kependudukan, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan yang terintegrasi untuk menghadapi dinamika demografis di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika manajemen konflik dalam pemanfaatan bonus demografi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Keluarga. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam proses, konteks, serta pola interaksi antar-pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan demografis. Fokus utama metode ini adalah menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian konflik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Mappasere & Suyuti, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta telaah terhadap laporan resmi yang berkaitan dengan isu ketahanan demografis, perencanaan keluarga, lingkungan hidup, dan pembangunan manusia. Sumber data mencakup peraturan kementerian, publikasi ilmiah, laporan statistik nasional, serta dokumen strategis yang memuat arah pembangunan jangka panjang. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, memetakan variabel yang relevan, dan menemukan keterkaitan antara bonus demografi dan potensi konflik dalam implementasi kebijakan (Driya et al., 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengorganisir informasi secara sistematis melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan penarikan makna dari berbagai sumber. Tahapan analisis meliputi identifikasi isu, analisis hubungan antar-variabel, serta penilaian terhadap efektivitas mekanisme resolusi konflik yang diterapkan. Hasil temuan dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peran lembaga pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan melalui pemanfaatan populasi usia produktif secara optimal. Pendekatan metode ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat, relevan, dan dapat dijadikan dasar pengembangan strategi kebijakan di masa mendatang (Wijaya, 2018).

HASIL

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan bonus demografi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Keluarga menghadapi sejumlah tantangan strategis yang berpotensi menimbulkan konflik kebijakan. Temuan utama mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas penduduk usia produktif dan ketersediaan peluang ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Kondisi tersebut diperkuat oleh variasi kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah, sehingga memunculkan kesenjangan dalam pemanfaatan potensi demografis. Situasi ini menuntut adanya intervensi terarah agar produktivitas penduduk usia kerja dapat meningkat secara merata (Sagara et al., 2025).

Selain itu, analisis terhadap dokumen kebijakan menunjukkan bahwa ketidakselarasan antarprogram lintas sektor menjadi salah satu sumber konflik yang dominan. Beberapa kebijakan yang difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga belum sepenuhnya terintegrasi dengan agenda lingkungan hidup maupun pembangunan manusia. Ketidaksinkronan ini memunculkan tumpang tindih peran, hambatan koordinasi, serta keterlambatan implementasi program. Pola interaksi antarlembaga memperlihatkan bahwa mekanisme komunikasi formal belum sepenuhnya menjembatani kebutuhan koordinasi, sehingga diperlukan penguatan struktur tata kelola yang lebih adaptif.

Hasil kajian juga mengungkap bahwa aspek lingkungan berperan signifikan dalam mempengaruhi efektivitas pemanfaatan bonus demografi. Tekanan terhadap sumber daya alam, risiko bencana, dan perubahan iklim menambah kompleksitas pengambilan kebijakan yang melibatkan penduduk usia produktif. Ketahanan lingkungan yang rendah berpotensi meningkatkan kerentanan sosial serta menciptakan konflik baru terkait pemanfaatan lahan, akses terhadap sumber daya, dan keberlanjutan ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi perencanaan ekologis dengan strategi pembangunan keluarga merupakan langkah penting untuk memastikan stabilitas demografis jangka panjang (Judijanto et al., 2025). Berdasarkan hasil telaah empiris memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penentu dalam mengurangi ketegangan sosial selama proses pemanfaatan bonus demografi. Penduduk usia produktif dengan tingkat pendidikan yang lebih baik menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi terhadap perubahan struktur ekonomi. Situasi ini memperkecil risiko konflik yang bersumber dari ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, investasi pada modal manusia menjadi landasan penting dalam menciptakan populasi yang tangguh, kompetitif, dan mampu berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Manajemen konflik memiliki peran fundamental dalam mengarahkan pemanfaatan bonus demografi secara optimal. Pendekatan resolusi konflik diperlukan untuk mengatasi perbedaan kepentingan antaraktor, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta meningkatkan responsivitas terhadap perubahan demografis dan lingkungan. Dengan menggunakan analisis berbasis data dan memperhatikan dinamika struktural, pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Temuan ini memberikan dasar empiris bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek kependudukan, keluarga, dan lingkungan secara holistik.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan bonus demografi sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pemerintah dalam mengelola dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Temuan ini sejalan dengan pandangan Kamsurya dan Susanto yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan meminimalkan potensi konflik kebijakan (Sutikno, 2020). Dalam konteks Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Keluarga, integrasi antara program ketahanan keluarga, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa ketidakseimbangan kualitas penduduk usia produktif berkontribusi pada meningkatnya risiko konflik pembangunan. Situasi ini diperparah oleh ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang dalam banyak kasus menjadi pemicu ketegangan antarpemangku kepentingan. Temuan tersebut mendukung kajian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kualitas modal manusia menentukan sejauh mana bonus demografi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan stabilitas sosial (Hababil et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat harus masuk dalam prioritas utama pemerintah. Diskusi juga menyoroti bagaimana tekanan lingkungan memperumit proses pemanfaatan bonus demografi ketika kapasitas ekosistem tidak mampu menampung peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Keterbatasan sumber daya alam dapat memicu konflik baru terkait penggunaan lahan, pengelolaan limbah, dan eksploitasi sumber daya, terutama di wilayah dengan daya dukung lingkungan rendah. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara pertimbangan ekologis dan strategi demografis untuk mencegah kerusakan jangka panjang

yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (Aulia et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan integratif yang memperhatikan keseimbangan ekologis menjadi sangat diperlukan.

Selanjutnya, penguatan tata kelola dipandang sebagai strategi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi antarinstansi belum berjalan optimal, sehingga memengaruhi efektivitas koordinasi program dan respons terhadap masalah demografis. Kondisi ini mengonfirmasi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi mengenai tata kelola pemerintahan modern (Setiawan & Arti, 2024). Dengan memperkuat kapasitas institusional dan memperjelas peran masing-masing pihak, peluang terjadinya konflik dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, diskusi ini menekankan bahwa konflik dalam pemanfaatan bonus demografi bukan hanya persoalan perbedaan kepentingan, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural yang perlu ditangani melalui kebijakan komprehensif berbasis data. Integrasi antara perspektif lingkungan, keluarga, dan demografi memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif, sehingga potensi demografis dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ketahanan pembangunan jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan bonus demografi hanya dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan berkelanjutan apabila disertai pengelolaan konflik yang terencana dan terintegrasi. Temuan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kapasitas penduduk usia produktif, ketimpangan layanan dasar, serta tekanan lingkungan merupakan faktor utama yang memengaruhi dinamika konflik pada tingkat kebijakan. Situasi ini menuntut adanya kolaborasi lintas sektor dan koordinasi kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan setiap program berjalan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Kesimpulan lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berperan krusial dalam menurunkan risiko konflik yang berasal dari ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Pendekatan berbasis data dan evaluasi berkelanjutan menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan ekologis. Dengan penguatan kapasitas institusi serta pemetaan

risiko yang lebih komprehensif, pemerintah dapat mengurangi potensi hambatan yang muncul selama proses pemanfaatan bonus demografi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa manajemen konflik bukan hanya bagian dari proses penyelesaian masalah, tetapi juga komponen strategis dalam mendukung ketahanan demografis dan keberlanjutan pembangunan. Pengintegrasian perspektif keluarga, lingkungan, dan demografi menjadi arah penting yang perlu dipertahankan dalam penyusunan kebijakan jangka panjang. Upaya tersebut memberikan peluang bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Keluarga untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang tangguh, inklusif, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

REFERENSI

- Aulia, M. R., Atikah, Q., Hartini, H., Sani, S. R., & Maulidia, V. (2025). *Ekonomi Hijau sebagai Tantangan Pembangunan Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Driya, P. D., Putra, I. G. L. A. R., & Pradyana, I. M. A. (2021). Teknik Pengumpulan Data pada Audit Sistem Informasi dengan Framework COBIT. *INSERT: Information System and Emerging Technology Journal*, 2(2), 70–83.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9.
- Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., & Mudjiyanti, R. (2025). *Ekonomi Kontemporer: Dinamika dan Tantangan Abad 21*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lubis, S., & Romadhona, S. (2024). Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pernikahan Dini dalam Memperkuat Bonus Demografi 2045. *Jurnal Landraad*, 3(1), 305–318.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33, 1–10.
- Masruchiyah, N., & Laratmase, A. J. (2023). Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 12(2), 125–138.
- Sagara, R., Setiawan, A. H., & Purnawan, E. (2025). Dinamika Kependudukan dan Ketenagakerjaan: Tantangan dan Kebijakan Berkelanjutan untuk Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 317–329.
- Setiawan, I., & Arti, N. D. B. (2024). Hubungan Inovasi Pemerintahan terhadap Restrukturisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 234–248.
- Soesaty, B. (2024). Strategi Empat Konsensus Kebangsaan bagi Pembangunan Generasi Muda dalam Menyongsong Bonus Demografi dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat Kepulauan Riau. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 43–66.
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus Demografi di Indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(2), 421–439.
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 3(1), 1–10.